

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah Indonesia sering disebut sebagai wilayah agraris, yang dimana menurut (Putu & Aryawati, 1952) Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. banyak masyarakatnya bekerja sebagai petani. Pada saat ini profesi petani pun sudah ada organisasi khusus untuk memenuhi kebutuhan koordinasi dan memudahkan komunikasi antara petani satu dengan yang lain. Organisasi ini disebut kelompok tani. Pemberdayaan petani melalui organisasi kelompok tani ini dinilai tepat untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Dalam fungsinya tentu saja organisasi ini tidak lepas dari peraturan desa yang didudukinya. Desa adalah sistem pemerintahan terkecil dari sebuah pemerintahan negara. Karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka setiap tatanan yang ada didalamnya diatur dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut (Firdaus, 2020) Pembangunan nasional telah menjadi komitmen pemerintah dalam mencapai peningkatan pembangunan pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu komponen pembangunan nasional menuju swasembada pangan guna mengentaskan kemiskinan. Pentingnya peran sektor pertanian dalam pembangunan nasional diantaranya sebagai penyerap tenaga kerja, menyumbang produk domestik bruto, sumber devisa, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor pertanian lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa yang ideal menurut undang-undang tersebut adalah desa yang kuat, maju inovatif dan demokratis.

Menurut Mardikanto (1996:435) yang dikutip dalam jurnal (Raintung et al., 2021) pengertian kelompok tani adalah sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri atas petani dewasa maupun petani taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.

Berbagai macam kebijakan telah dilakukan dalam pelaksanaan organisasi kelompok tani ini. (Nardin, 2019) dalam jurnalnya yang berjudul Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes menyebutkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program BUMDes. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hidroponik mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hidroponik tidak terawatt.

Adapun menurut (Manopo & Ngangi, 2018) menunjukkan bahwa peran pemerintah desa terhadap Kelompok Tani karya Lestari di Desa Talikuran Satu

Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa tergolong sangat baik dan berperan dalam memberikan hasil pemasaran tanaman, dalam menghadiri pertemuan/musyawarah, tukar menukar pikiran dalam berusaha tani, berperan dalam mengajarkan ketrampilan dalam berusaha tani, berperan dalam melakukan pencatatan keanggotaan kelompok tani yang berkembang, dan melaksanakan forum penyuluhan untuk anggota kelompok tani.

Penelitian lain seperti (Soetarto et al., 2019) menyebutkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian Dilapanganolehpeneliti mengenai faktor-faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberdayaanmasyarakat kelompok tani, yaitu berkurangnya lahan pertanian petani, masalah kepemilikan lahan dan masalah irigasi.Faktor-faktor inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat petani di Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli. Kemudian faktor pendukung Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat petani yaitu adanya dukungan dari Dinas Pertanian dan Kelautan yang telah memberikan fasilitas petani dalam bentuk sarana dan prasarana seperti Jetor, mesin pompa air, pupuk bersubsidi, benih padi dan mesin perontok padi.

Dengan hasil temuan di atas, jika dihubungkan dengan fakta di desa kedungpari kecaamatan mojawarno sangat tepat. Karena kegiatan ekonomi desa masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat menurut informasi yang berada dalam web resmi desa kedungpari yang menyebutkan bahwa wilayah desa kedungpari 70% adalah wilayah persawahan. Akan tetapi dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil yang optimal. Padahal, dari segi pemasaran hasil pertanian banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Kemungkinan kurang optimalnya hasil yang diperoleh karena sebagian petani yang ada di desa kedungpari ini tidak hanya bekerja sebagai petani melainkan memiliki pekerjaan lain. Pekerjaan sebagai petani dianggap hanya

sebagai pekerjaan sampingan yang memiliki nilai asset tinggi. Pekerjaan utama petani di desa kedungpari ini adalah karyawan swasta, guru, pedagang serta pekerjaan lainnya.

Peranan pemerintah desa dirasa sangat penting dalam mendukung suksesnya program organisasi kelompok tani ini. Seperti yang dijabarkan oleh (Raintung et al., 2021) Dengan terbentuknya Gapoktan dapat dilihat bahwa peran pemerintah sebagai regulator sudah berjalan tapi belum. Namun untuk aturan yang berkaitan khusus dengan kegiatan gapoktan Pemerintah desa sendiri belum membuatnya. Pemerintah hanya menjalankan aturan yang ada dalam UU No 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Mobuya telah menjalankan tugasnya sebagai regulator walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pembuatan aturan dan program yang ada. Peran pemerintah terhadap kelompok tani bukan hanya sebagai regulator saja akan tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lain diantaranya sebagai fasilitator, dinamisator, dan katalisator.

Sedangkan fakta dilapangan menunjukan bahwa peran pemerintah desa terhadap kelompok tani desa Kedungpari kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang ini sudah memenuhi peran sebagai fasilitator. Petani di Desa Kedungpari ini sebagian besar menanam padi, jagung dan tebu. Sebagian juga ada yang menanam sayuran dan buah-buahan.

Makna pemerintah desa sebagai fasilitator menurut (Firdaus, 2020) yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Pemerintah desa sebagai fasilitator disini dalam pengaplikasiannya di Kelompok Tani Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang ialah pemerintah desa

memfasilitasi keberadaan pupuk subsidi dan tempat penggilingan padi dan jagung yang menjadi salah satu fasilitas bagi petani di desa kedungpari.

Selain pada peran tersebut pemerintah desa perlu mengadakan kerjasama yang baik dengan organisasi kelompok tani seperti yang telah di paparkan oleh (Ulumiyah et al., 2013) Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Sumberpasir mempunyai kerjasama yang baik antara pihak swasta dan masyarakat serta mempunyai anggaran dana yang baik dalam mendukung kelancaran pembangunan yang ada di Desa Sumberpasir. Dengan adanya kerjasama yang baik menyebabkan kelancaran pembangunan yang diharapkan. Juga dengan adanya kerjasama yang baik memudahkan dalam penyampaian informasi yang sewaktu-waktu sangat diperlukan.

Dengan terjaganya pola hubungan antara masyarakat tani dengan pemeritahan desa tentulah sangat menguntungkan bagi kedua pihak. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah desa bisa mengkalkulasi pendapatan masyarakat desa per tahun dan bisa dijadikan data dalam pengembangan usaha pertanian ini. Adapun keuntungan yang didapat oleh masyarakat tani ialah masyarakat tidak lagi bingung untuk mencari pupuk yang subsidi dan jika ada masalah sekecil apapun akan segera terdeteksi oleh pemerintah desa dan akan segera ditangani oleh pemerintah desa selaku pemerintah desa memiliki peran sebagai regulator atau pemberi kebijakan.

B. Fokus penelitian

Kegiatan ekonomi desa Kedungpari masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa kedungpari 70% adalah persawahan. Akan tetapi dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil yang optimal. Peranan pemerintah desa dirasa sangat penting dalam mendukung suksesnya program kelompok tani ini. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas mengenai peran pemerintah desa terhadap kelompok tani di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Penulis ingin mengetahui latar belakang kemajuan kinerja kelompok tani di Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Dari latar belakang tersebut dapat diketahui diatas, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Seberapa besar peran pemerintah sebagai fasilitator dalam kemajuan kinerja Kelompok Tani Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa sebagai fasilitator pada kinerja kelompok tani Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Juga untuk mengetahui alasan yang mempengaruhi kemajuan kinerja Kelompok Tani Desa Kedungpari Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang. Karena jika di dilihat dari hasil observasi terdapat dua kemungkinan alasan yang menjadi kemajuan kinerja Kelompok Tani tersebut. Kemajuan kinerja kelompok tani di dasari oleh peran pemerintah Desa Kedungpari dan juga karena letak wilayah Desa Kedungpari 70% adalah persawahan.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat bagi mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber data penelitian selanjutnya. Secara umum Penelitian ini juga bermanfaat sebagai sumber data untuk mengetahui alasan yang

mempengaruhi Kelompok Tani Desa Kedungpari bisa maju seperti sekarang ini. Juga untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam upaya memajukan kelompok tani desa Kedungpari ini, apakah memang faktor pendukung dari pemerintah desa ataupun optimalisasi wilayah Desa Kedungpari yang 70% adalah wilayah persawahan.

2. Manfaat bagi pemerintah desa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah desa menjadi mengerti mengenai inovasi yang harus dilakukan untuk mempertahankan kemajuan kinerja kelompok tani desa kedungpari. Dengan luas wilayah yang 70% adalah wilayah persawahan diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk pemerintah desa dalam menjalankan tugas sebagai fungsi regulasi bagi kelompok tani desa kedungpari.

